

Kedaulatan Negara dalam Mengantisipasi Dampak Negatif Globalisasi

Yusri Munaf

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

KONTEKS KEDAULATAN NEGARA

Isu yang sangat mengusik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah persoalan yang menyangkut ketahanan nasional sebuah negara. Isu yang berkembang tentang kondisi suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan, dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional suatu bangsa.

Dalam hubungan internasional isu kedaulatan merupakan hal yang paling sensitif untuk dibicarakan, karena setiap negara yang telah merdeka dan telah diakui oleh negara-negara di dunia memiliki kedaulatan masing-masing. Kedaulatan itu sendiri merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur seluruh kehidupan negaranya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Namun pada masa sekarang ini kedaulatan tersebut telah mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan pada abad ke-18 dan abad ke-19 seiring dengan berkembangnya pola pikir dan kehidupan negara-negara di dunia dan dengan didasari oleh adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain.

Di Indonesia ketahanan nasional dipandang sebagai tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Ini merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang yang memfokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan negaranya. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu didirikanlah sebuah Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Sejarah mencatatkan Lembaga Pertahanan Nasional berdiri pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan berada langsung di bawah Presiden. Sejak tahun 2006, berdasarkan Perpres No. 67 Tahun 2006, mengingat beban dan tanggung jawab lembaga, maka jabatan Gubernur Lemhannas disejajarkan dengan Jabatan Menteri.

Kedaulatan merupakan salah satu isu penting yang harus dicari solusi pemecahan masalah yang sering terjadi. Kedaulatan sebagai suatu kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku pada seluruh wilayah negara mutlak dipertahankan mengingat eksistensi sebuah negara dalam menjaga marwahnya. Menurut *Jean Bodin* kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Maka, kedaulatan adalah salah satu pilar utama yang paling penting dari sebuah negara. Sebuah negara tidak akan berdiri tanpa pengakuan atas kedaulatannya. Oleh karena itu tegaknya kedaulatan adalah faktor mutlak yang harus dimiliki oleh suatu bangsa yang bernegara. Adanya infiltrasi dari luar yang menyebabkan melemahnya kedaulatan suatu negara adalah sebuah kondisi yang berbahaya dan sangat patut diwaspadai karena pelemahan kedaulatan bukan hanya berkaitan erat dengan pertahanan-keamanan tapi juga berhubungan erat dengan kehormatan dan harga diri suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga kedaulatannya sehingga bangsa itu dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terbesar di dunia tidak lepas mengalami krisis kedaulatan. Dalam satu dasawarsa ini, Indonesia sering dihadapkan dengan masalah-masalah kedaulatan negara. Dan dewasa ini isu tersebut semakin mengemuka. Beberapa masalah yang mengancam kedaulatan Indonesia antara lain:

1. Sengketa Sipadan dan Ligitan Pemerintah Indonesia dihadapkan dengan masalah mengenai wilayah kedaulatan NKRI, yaitu masalah kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang diklaim oleh negara tetangga dan pada tanggal 17 Desember 1998, Pemerintah Indonesia terpaksa melepas kedua pulau tersebut setelah ICJ atau Mahkamah Internasional menyerahkan pemilikan dua pulau tersebut pada Malaysia.
2. Hasil pengamatan petugas yang berpatroli di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan menemukan patok perbatasan yang berpindah beberapa kilometer dari letak sebelumnya.
3. Setelah Sipadan dan Ligitan akhirnya dilepas muncul kembali permasalahan yang sama pada sekitar tahun 2002. Negri jiran itu kembali mengklaim Blok Ambalat yg terletak di perairan laut Sulawesi sebelah timur pulau Kalimantan tidak jauh dari Sipadan dan Ligitan.

Dari catatan peristiwa tersebut Pemerintah Indonesia harus waspada dan mulai memberikan perhatian yang lebih pada masalah batas wilayah Indonesia yang merupakan kedaulatan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mungkin karena respon pemerintah yang kurang proaktif dan kurang tegas, kejadian lain yang mengobok-obok kedaulatan Indonesia muncul kembali. Kali ini bukan masalah batas dan kepemilikan wilayah tapi dalam bidang budaya yang merupakan kekayaan intelektual bangsa Indonesia yang dewasa ini makin mencuat. Kita tentu sudah tahu bahwa Malaysia telah mengklaim beberapa produk budaya Indonesia

seperti; lagu rasa sayang, kerajinan batik, reog ponorogo, rendang dan baru-baru ini mereka mengklaim tari pendet yg merupakan tarian budaya Bali. Tersebar pula isu penjualan pulau kecil ke tangan investor asing oleh penduduk pribumi.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 pasal 1 butir 4 menjelaskan:

“Batas wilayah negara adalah garis batas yang memisahkan kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas Hukum Internasional”. Pasal 2a tentang pengaturan wilayah: “Pengaturan wilayah negara bertujuan menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa.”

Mungkin kita bisa mengatakan bahwa hal-hal tersebut terjadi sebagai akibat kelalaian pemerintah terhadap kedaulatan negara termasuk kurangnya perhatian terhadap alat pertahanan negara sebagai penjaga kedaulatan dan cara dalam menjaga kedaulatan tersebut. Padahal lemahnya kedaulatan suatu negara di mata negara lain atau dunia internasional akan mengakibatkan jatuhnya integritas dan kehormatan bangsa sehingga memungkinkan negara lain tidak segan melakukan intervensi bahkan tidak segan melecehkan atau bertindak sewenang-wenang terhadap warganegara tertentu. Seperti halnya perlakuan sewenang-wenang yang menimpa para TKI yang disebabkan oleh karena sangat kurangnya perlindungan negara terhadap mereka.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.

Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut Ernest Renan: kehendak untuk bersatu (*le desir d’être ensemble*) dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia.

Maka Pancasila merupakan *intelligent choice* karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbezaan (*indifferentism*), tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka “Bhinneka Tunggal Ika”. Mengenai hal itu pantaslah diingat pendapat Prof. Dr. Supomo: “Jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran fikiran negara (*Staatside*) integralistik. Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya”

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahawa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahawa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979: 30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, iaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”

Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia *qua talis*, manusia adalah manusia sesuai dengan *principium identitatis*-nya.

Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.

Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat

sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:

1. *Ketuhanan yang mahaesa*, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. *Persatuan Indonesia*, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL

Sumber konflik Malaysia-Indonesia berkaitan dengan perebutan sumber-sumber ekonomi seperti di Sipadan-Ligitan, Ambalat, masalah lintas batas, perdagangan gelap, *illegal logging*, *migrant* dan *human trafficking*. Demikian juga dilaporkan sering terjadi pelanggaran perbatasan oleh Malaysia baik perbatasan udara, laut dan darat yang kemudian akan menimbulkan protes dari pihak Indonesia. Masalah-masalah ini jelas sangat penting untuk diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Namun sejauh ini penyelesaian berbagai-bagai masalah ini sering terhambat pada soal teknis pelaksanaan yang sulit dan kurangnya kemahuan politik di kedua negara untuk sungguh-sungguh

dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian yang dilakukan dalam keadaan demikian sering kali bersifat reaktif dan sporadik tanpa menyelesaikan akar permasalahan sebenarnya. Ketika pemimpin Malaysia misalnya minta maaf sebagaimana dituntut oleh Indonesia atas beberapa masalah yang terjadi, hubungan kedua negara seperti normal kembali. Namun suatu saat beberapa masalah dengan sumber yang sama seperti penganiayaan terhadap TKI akan muncul kembali dan menimbulkan emosi dan reaksi yang berlebihan. Sejauh ini pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan masalah ini bertumpu pada sebab-sebab material dan hubungan sebab akibat.

Konflik tersebut dapat teratasi jika masing-masing Negara memegang teguh asas-asas Ketahanan Nasional yang menyiratkan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya ditegakkan. Asas ketahanan Nasional itu di antaranya:

1. Asas kesejahteraan dan keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan keperluan manusia yang paling mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam kehidupan nyata kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitik beratkan pada kesejahteraan, namun tidak mengabaikan keamanan yang ada. Sebaliknya memberikan prioritas terhadap keamanan tidak harus selalu ada, berdampingan pada apa pun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan Negara.

2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu.

Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa secara utuh dan menyeluruh dan juga terpadu atau tersusun dalam bentuk berwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan suatu bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).

3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar.

Suatu sistem kehidupan nasional merupakan suatu perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dari berbagai lingkungan yang ada di sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai-bagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan keluar.

Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat-sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan suatu nilai-nilai kemandirian yang

proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi (tertutup) atau nasionalisme sempit (*chauvinisme*).

Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan yang strategis luar negeri, dan dapat menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia globalisasi datau dunia internasional. Untuk menjaminnya kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan bagi berbagai-bagai pihak.

4. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya suatu perbezaan yang seharusnya dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan asas kekeluargaan untuk pertahanan negara menganut prinsip berikut:

- Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.
- Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya.
- Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif.
- Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
- Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

POTENSI KEKUATAN HUBUNGAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Jika tiga negara yang letaknya sangat strategis sadar akan kekuatannya, maka negara tersebut akan menguasai politik dan perekonomian. Apa saja dari tiga negara tersebut? Itulah negara yang berada di kawasan Asia, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tiga negara ini sebenarnya bisa menggoncang politik dan perekonomian dunia. Tiga negara ini juga negara yang mempunyai posisi yang sangat penting di ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk menjaga keamanan di kawasan Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga menjadi himpunan kekuatan negara non-blok, yang mana dulu terjadi perselisihan bipolar atau dua kubu yaitu Timur (Uni Soviet) dan Barat (Amerika Serikat). Tujuan awal ASEAN sebenarnya untuk menjaga keamanan, akan tetapi dapat kita lihat masih ada konflik antara Thailand dan Kamboja. Untuk itu ASEAN perlu diperkuat kembali barisannya.

Salah satu negara di Asia yang ditakuti oleh negara Barat adalah Indonesia. Indonesia yang menguasai jalur perdagangan dengan lima samudra, memiliki banyak pulau dan luas wilayah yang kaya sumber daya alam. Selain itu, Indonesia dulunya mempunyai sejarah yang gemilang seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan lainnya. Perlu rakyat Indonesia ketahui, negara kuat sekarang tidak akan senang jika Indonesia bangkit. Jika Indonesia bangkit dan menjadi negara yang berpengaruh, sangat bisa Indonesia menjadi negara yang *super power*, oleh sebab itulah negara kuat sekarang lebih senang jika Indonesia menjadi negara yang berkembang.

Kerjasama antara tiga negara yang bertetangga, akan dapat mengatasi persoalan di ASEAN. Tiga negara ini yang memiliki banyak persamaan dan memiliki keunggulan masing-masing, dapat menjadi negara penyeimbang (*balancer*) kekuatan luar yang masuk ke ASEAN, seperti China, India, Eropa, Amerika dan lainnya. Indonesia, Malaysia dan Singapura adalah negara yang memiliki banyak kesamaan. Dengan kekuatan tiga negara ini, kawasan ASEAN akan terjaga, dengan ketentuan pemimpin negara tersebut adalah pemimpin yang berkarakter. Sebagaimana pemimpin di Indonesia seperti Soekarno atau Soeharto dulunya, sebab saat ini banyak negara yang tidak mempunyai pemimpin yang hebat dan berkarakter.